



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	19 Februari 2025	Media	Koran Padang
Kategori	PEMERINTAHAN	Jurnalis	mas

Harian Umum

KORAN PADANG

Berani Menyampaikan Santun Mengkritis

KLIPING KORAN

HARI : Rabu

TANGGAL : 19 Februari 2025

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SELEKSI DIDUGA TIDAK SESUAI PEDOMAN

Status 420 Guru PPPK di Pariaman Dicabut

PARIAMAN, KP - Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Roberia, membatalkan pengangkatan 420 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pembatalan atau pencabutan status tersebut lantaran proses seleksi guru PPPK terbukti cacat prosedur.

Roberia mengatakan, sebelumnya 420 guru diangkat sebagai PPPK untuk mengajar di sejumlah sekolah di Kota Pariaman. Namun berdasarkan pemeriksaan, ditemukan bukti bahwa ratusan guru tersebut tidak mengajar di sekolah-sekolah yang telah ditunjuk.

Berdasarkan fakta itu, status 420 guru yang sebelumnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dicabut dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Mereka tidak terbukti mengajar, maka

BERSAMBUNG KE HAL. 11



Ilustrasi PPPK.

■ Seleksi Diduga

saya TMS-kan," ujar Roberia, dikutip dari laman sumbarkita.id, Selasa (18/2).

Roberia menjelaskan, penunjukan ratusan guru PPPK dilakukan oleh tim seleksi tanpa sepengetahuan dirinya.

Ia pun menduga seleksi dilakukan tidak berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, pengangkatan guru PPPK harus didasarkan pada kriteria yang jelas untuk memastikan bahwa setiap guru yang dipilih benar-benar memenuhi syarat serta dapat berkontribusi secara nyata di dunia pendidikan.

Ia tidak memberi toleransi terhadap penyimpangan prosedur dalam pengangkatan guru PPPK. "Tidak ada toleransi bagi yang tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai pemimpin daerah, saya bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan di Kota Pariaman berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan," imbuhnya.

Untuk itu, Roberia berjanji akan mengevaluasi kembali sistem seleksi dan memastikan bahwa proses pengangkatan guru di masa depan akan lebih transparan serta melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. (ski/*)

